

# Bawaslu Ungkap Penanganan Laporan Mendes Yandri Susanto dan Ratu Zakiyah Buntut Acara Haul Orangtuanya

written by Kabar 6 | 30 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Badan Pengawas Pemilu ([Bawaslu](#)) Kabupaten Serang menyatakan laporan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan istrinya Ratu Zakiyah sudah diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu [Kabupaten Serang](#) akan memanggil pelapor.

“Sudah di register, tahapannya kita panggil pelapor,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Furqon saat dikonfirmasi, Rabu (30/10/2024).

Dikatakan Furqon, pemanggilan itu untuk melengkapi syarat formil dan materil. Nantinya, Bawaslu akan melakukan pleno untuk memastikan apakah ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau tidak.

**\*\*Baca Juga:** [3 Laporan ke Bawaslu Lebak Selama Masa Kampanye Pilkada tentang Dugaan Ketidaknetralan Kades](#)

“Tapi untuk memenuhi syarat formil itu di panggil pelapor dan diakhir kajian itu apakah ini dugaan pelanggaran atau

tidak,"ungkapnya.

Sehingga Bawaslu belum bisa menyimpulkan apakah nantinya Mendes Yandri Susanto dan Ratu Zakiyah juga bakal pemanggilan, karena menunggu hasil pleno.

"Tergantung hasil pleno," ujarnya.

Namun acara haul orangtua Yandri yang menjadi sorotan publik karena dinilai menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi sang menteri itu, Bawaslu mengaku tidak menemukan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan saat acara berlangsung.

"Tapi dalam konteks pertengahan pun dapat dipatahkan kalau lihat hasil pengawasan, karena memang hasil pengawasan kemarin tidak ada dugaan pelanggaran," tegasnya.



Cabup Serang Ratu Zakiyah saat berfoto salam dua jari dengan tamu undangan acara haul orangtuanya. (foto/Aep)

Furqon mengatakan, bahan kampanye (BK) yang berada di lokasi acara haul di pondok pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang pada 22 Oktober 2024 itu terdapat 7 BK. Namun kata dia, BK tersebut sudah lama terpasang.

"BK itu sudah kita cek langsung ada 7 biji. Itu BK lama, dalam

BK itu juga masih bakal calon (bupati) yang nempel itu,” ungkapnya.

Selanjutnya, Bawaslu juga tidak menemui adanya pose salam dua jari pada saat acara berlangsung. Salam dua jari diketahui simbol dukungan kepada istri Mendes Yandri Tatu Zakiyah yang maju di Pilbup Serang nomor urut 2.

“Bahwa ada asumsi bahwasanya foto dua jari, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan dari sebelum sampai setelah acara,” ujarnya.

“Dalam posisi acaranya memang tidak ada temuan, tidak dugaan pelanggaran dari kita mulai sampai beres acara. Kalau foto (dua jari) terjadi setelah beres acara Bawaslu tidak mengawasi kesitu. Karena memang ini acaranya yang kita awasi sejak awal,” tutupnya.

Diketahui, Relawan Tampung Demokrasi Kabupaten Serang melaporkan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan istrinya yang juga kandidat Cabup Serang Ratu Zakiyah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Serang buntut penggunaan kop surat dan stempel kementerian untuk kepentingan pribadi.

\*\*Baca Juga: [Fahri Hamzah: Pembangunan Rumah Rakyat Berpenghasilan Rendah Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo – Gibran](#)

Diketahui, Yandri Susanto menggunakan stempel dan kop surat kementerian yang dipimpinya untuk kepentingan pribadi. Surat itu menjadi sorotan publik, bahkan mantan Kandidat Cawapres 2024 Mahfud MD turut menyentil Yandri untuk berhati-hati menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi.

Surat tertanggal 21 Oktober 2024 berisikan undangan Haul (peringatan hari wafat) ke-2 ibu Yandri Susanto, di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, pada 22 Oktober 2024 ditunjukkan kepada kepala desa, RT RW hingga kader posyandu. (Aep)

---

# 3 Laporan ke Bawaslu Lebak Selama Masa Kampanye Pilkada tentang Dugaan Ketidaknetralan Kades

written by Kabar 6 | 30 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Badan Pengawas Pemilu ([Bawaslu](#)) Kabupaten Lebak telah menerima 4 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024.

Dugaan pelanggaran tersebut masuk ke Bawaslu Lebak sejak masa kampanye dimulai pada 25 September 2024.

“Kalau laporan yang kami terima totalnya ada 9, tetapi pada tahapan kampanye ada 4 laporan,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Lebak, Dwi Agus Setiawan, di Rangkasbitung, Jumat (25/10/2024).

**\*\*Baca Juga:** [Blusukan Bareng Relawan SAS di Neglasari, Andra Soni Disambut Barongsai hingga Ondel-ondel](#)

Empat laporan yang masuk ke Bawaslu terdiri dari 1 laporan mengenai pengrusakan alat peraga kampanye (APK). Sedangkan 3

laporan tentang dugaan pelanggaran netralitas kepala desa (kades).

“Dua laporan sudah putus yaitu mengenai APK dan netralitas kades. Kedua laporan tersebut tidak memenuhi unsur,” terang Dwi.

Sementara dua laporan yang juga mengenai dugaan ketidaknetralan kades statusnya masih dalam kajian awal Bawaslu.

“Ada 5 kades di 5 kecamatan yang dilaporkan ke kami soal netralitasnya. Belum diregister, masih dalam kajian awal,” jelas Dwi. (Nda)

---

## Laporan 4 Komisi DPRD Lebak ke Banggar Hasil Raker dengan OPD Digelar Tertutup

written by Kabar 6 | 30 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Empat Komisi DPRD [Kabupaten Lebak](#) melaporkan hasil rapat kerja (raker) dengan organisasi perangkat daerah ([OPD](#)) ke Badan Anggaran (Banggar), di Ruang Bamus [DPRD](#) Lebak, Senin

(21/10/2024).

Laporan Komisi ke Banggar merupakan rangkaian dalam pembahasan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) Lebak Tahun Anggaran 2025.

Wakil Ketua DPRD Lebak Acep Dimiyati meminta perwakilan masing-masing komisi untuk menyampaikan hasil rapat dengan seluruh OPD yang menjadi mitranya.

**\*\*Baca Juga: [Akhir Bulan, KPU Lebak Mulai Geser Logistik Pilkada ke PPK](#)**

“Apakah ada penambahan atau pengurangan. atau ada usulan program yang diusulkan oleh Komisi,” kata Acep.

“Poin-poinnya saja, kalau memang tidak ada perubahan semua yang diusulkan TAPD full diterima tidak ada perubahan ya tidak mesti dilaporkan, tetapi kalau ada silahkan laporkan penambahannya apa, pengurangannya apa dan sumber dananya seperti apa,” sambungnya.

Akan tetapi, jalannya laporan tiap-tiap Komisi ke Banggar digelar tertutup dan tidak untuk diliput. Hal itu disampaikan Acep sebelum Komisi I menyampaikan laporannya.

“Usulan dari Komisi agar rapat ini tertutup, silahkan nanti teman media menanyakan hasilnya ke Ketua DPRD,” kata dia.  
(Nda)

---

# Senin Besok Kejari Kabupaten

# Tangerang Limpahkan Berkas Laporan Perumda Pasar

written by Kabar 6 | 30 Oktober 2024



Kabar6-Perumda Niaga Kerta Raharja memberikan sinyal ogah berdamai dengan Sutimah, koordinator pedagang [Pasar Kutabumi](#), Kecamatan Pasar Kemis. Perusahaan pelat merah di Kabupaten Tangerang itu ingin menyelesaikan laporan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang.

“Senin dilimpah ke pengadilan,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Herdian Malda Ksastria, saat dikonfirmasi kabar6.com dikutip Sabtu (24/3/2024).

Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja melaporkan Sutimah ke polisi atas sangkaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin Pasal 160 dan atau 385 KUHP dan atau Pasal 167.

Malda pastikan telah mengundang kedua pihak untuk berdamai. Namun ada pihak yang menolak, dan Korps Adhyaksa menyatakan sikap itu hak setiap warga negara yang sama di mata hukum.

“Terpaksa untuk selanjutnya kita limpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tangerang,” jelasnya.

Ia bilang, setelah menerima tersangka dan barang bukti dari kepolisian langsung kembali dicermati. Ternyata dalam pasal sangkaan memenuhi persyaratan restorative justice.

**\*\*Baca Juga: [Banjir Rendam Tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tiga Mesin Penyedot Dikerahkan](#)**

“Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice memenuhi persyaratan. Makanya, kita coba upayakan untuk proses restorative justice,” ujar Malda.

Terpisah, kuasa hukum pedagang Pasar Kutabumi, Kamarudin Simanjuntak menyebutkan pihaknya juga telah melaporkan Dirut Perumda Pasar NKR, Finny Widiyanti ke Mapolda Banten.

“Kemarin kita konfirmasi bila Finny sudah diperiksa oleh penyidik Polda Banten,” sebut Kamarudin di Kejari Kabupaten Tangerang. Ia menyatakan siap meladeni gugatan Perumda Pasar NKR di pengadilan.

“Soal pasal sangkaan masuk pekarangan tanpa izin itu bisa ditepis karena para pedagang punya sertifikat guna pakai hingga 2027 dan 2029,” tegasnya.

Sementara itu, Dirut Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja Finny Widiyanti enggan menanggapi. Upaya kabar6.com mengkonfirmasi lewat pesan singkat maupun sambungan telepon tidak direspon.

Polemik di atas bermula dari rencana Perumda NKR merevitalisasi Pasar Kutabumi. Rencana itu ditentang pedagang hingga terjadi penyerangan oleh sekelompok preman bayaran pada Minggu, 24 September 2023, sore.(yud)

---



# Dengar Laporan Ketua DPW se-Sumatera, Anis Matta Makin Optimistis Partai Gelora Lolos ke Senayan

written by Editor2 - | 30 Oktober 2024



Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengaku semakin optimistis bakal memenangkan pertarungan politik di Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan. Hal itu setelah mendengar laporan dari para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora se-Sumatera.

“Saya gembira sekali mendengarkan laporan persiapan kita untuk memenangkan Partai Gelora pada Pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang,” kata Anis Matta saat menyampaikan arahan dalam Konsolidasi Pimpinan Partai Gelora se-Sumatera di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Anis Matta mengapresiasi kerja keras para Pimpinan DPW se-Sumatera di lapangan di tengah keterbatasan logistik Pemilu. Ia menilai semua struktur atau mesin politik Partai Gelora sampai ke lapis paling bawah sudah bekerja optimal.

“Tim relawan para caleg juga sudah bekerja keras, paling tidak sudah lebih 80 persen wilayah ini (Sumatera) dalam kondisi siap. Insya Allah kita menang,” katanya.

Ia menilai kolaborasi antara struktur DPW se-Sumatera dengan relawan para calon legislatif (caleg)-nya di Sumatera sangat luar biasa.

“Karena itu, saya mengapresiasi para Ketua DPW selaku komandan lapangan yang memiliki pengetahuan teknis untuk mengatasi dinamika masalah yang ditemukan,” ujarnya.

Anis Matta mengatakan, permasalahan logistik Pemilu sekarang tidak hanya dialami Partai Gelora saja, tapi juga seluruh partai politik karena berlangsung di tengah krisis ekonomi.

“Keluhan kebutuhan semua caleg sekarang relatif merata, karena Pemilu ini berlangsung di tengah krisis ekonomi. Semua menghadapi tekanan finansial secara logistik, tekanannya luar biasa,” katanya.

Ia mengingatkan dua pepatah Rusia yang bisa menjadi pemantik semangat caleg Partai Gelora yang akan melakukan pertarungan politik di Pemilu 2024.

Pepatah pertama adalah “Ketika kita menderita, orang lain menderita juga seperti tidak ada penderitaan atau kesulitan”. Sedangkan pepatah kedua adalah “Kemiskinan mendorong kita menjadi kreatif”.

“Saya mengikuti perkembangan pertempuran yang sekarang sedang terjadi di Palestina. Bagaimana Israel yang kuat dari sisi kekuatan, melawan Hamas yang kalah dari sisi teknologi. Saya mencoba mempelajari apa rahasia kekuatan Hamas tersebut,”

katanya.

Hamis, kata Anis Matta, memfokuskan targetnya kepada tank-tank dan kekuatan militer lainnya. Semua persenjataan dan amunisi yang diluncurkan dihitung benar-benar harus mengenai sasaran, dan tidak ada yang meleset.

“Akibatnya korban militer di Israel banyak yang jatuh, sementara korban di Palestina adalah warga sipil. Jadi apa yang mereka lakukan benar-benar fokus kepada target dan sasaran. Mereka fokus pada kekuatannya sendiri,” katanya.

Hal inilah, lanjutnya, yang membuat psikologis Israel melemah, dan Hamas memenangi pertempuran sejauh ini, karena banyak korban tewas di militer Israel. Tingkat efisensi tembakan roket Hamas sangat akurat, karena adanya fokus tersebut.

\*\*Baca Juga: [Percakapan Gibran di Sosial Media Paling Populer Dibandingkan Ganjar](#)

“Jadi kita perlu menggunakan semua potensi yang kita miliki dan fokus apa yang bisa kita lakukan, jangan pikirkan kelemahan kita. Kita harus melakukan inovasi di tengah keterbatasan. Dan sebagai orang beriman, kita juga percaya bahwa Allah SWT-nya yang membuat sasaran itu menjadi tepat,” katanya.

Inovasi dalam Pemilu 2024 ini, lanjut Anis Matta, yang akan mengantarkan caleg-caleg Partai Gelora yang sebagian besar elite-elite daerah akan menjadi elite nasional, serta duduk sebagai Anggota DPR.

“Partai Gelora akan menjadi tangga naik, orang-orang daerah menjadi orang pusat. Supaya nanti yang namanya elite Indonesia itu adalah elite yang terdiri dari elite-elite daerah yang datang ke Jakarta dan mengerti betul daerahnya. Sehingga akan berdampak secara substansial menciptakan sirkulasi elite nasional baru,” pungkasnya.

Konsolidasi Pimpinan Partai Gelora-Sumatera ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Teritori I Sumatera DPN Partai Gelora Syahfan Badri Sampurno, dan Wakil Ketua Bidang Narasi Tengku Zulkifli Usaman yang juga caleg DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 2.(Tim K6)

---

## Laporan Korban Jambret Tidak Diterima Polda Banten

written by Editor2 - | 30 Oktober 2024



Kabar6-Korban jambret, Karin dan Sukma, kehilangan jejak pelaku usai didorong jatuh ketika mengejar jambret. Mereka kemudian melapor ke Polda Banten, namun ditolak.

Keduanya kemudian disuruh membuat laporan polisi ke Polresta Serkot. Beruntung, personel Satreskrim Polresta Serkot sigap,

Karin dan Sukma segera diajak kembali ke lokasi penjambretan yang berdekatan dengan Mapolda Banten. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan oleh polisi.

Laporan dan mendatangi lokasi kejadian, dilakukan di hari yang sama, saat keduanya jadi korban begal, yakni Kamis, 02 November 2023.

“Udah lapor, udah cek TKP juga. Tadi kita udah ke Polda (Banten), kata orang Polda (Banten) itu, disuruh ke Polres (Serkot). (Pelaku jambret) 2 orang naik motor beat,” jelas Karin, di Mapolresta Serkot, Kamis, (02/11/2023).

Sebelumnya diberitakan bahwa Karin Candra (21) dan Sukma (22) jadi korban jambret di hutan kota serang, dekat dengan Polda Banten. Peristiwa nahas itu terjadi pada Kamis siang, 02 November 2023, sekitar pukul 14.00 wib. Akibatnya, handphone serta kartu ATM hilang dicuri penjahat itu.

Saat itu, Karin dan Sukma berangkat dari rumahnya di Ciruas, Kabupaten Serang, menuju Benggala di Kota Serang, Banten, karena mendapatkan pelanggan untuk layanan salon home service.

\*\*Baca Juga: [Pemuda Muhammadiyah Banten Resmi Dilantik, Rifki Hermiansyah: Pemimpin Harus dikuasai Anak Muda Visioner](#)

Karin bertugas melihat arah jalan dari aplikasi google map. Sedangkan temannya, Sukma, mengendarai sepeda motor dibawah instruksi Karin.

Saat melintasi sekitar hutan Kota Serang yang jaraknya tak begitu jauh dari Polda Banten, mereka dijambret. Pelaku yang berjumlah dua orang itu awalnya berusaha mengambil tas yang dibawa Karin, karena tidak berhasil, kemudian mengambil handphone yang dipegang korban. Nahas, kartu ATM juga ada dibalik handphone ikut digondol maling.

“Berdua dari arah Ciruas mau ke arah Polda sini, lewat nya hutan kota, terus di jalan itu tiba-tiba, dia *kayaknya* udah

*ngincer* tas saya, cuma karena sayanya kenceng megang tasnya, jadi dia *ngambil* hp saya,” ujar Karina Candra (22), Jumat (03/11/2023). (Dhi)

---

# Pemilu 2024, Ini Penanganan Dugaan Tipikor Capres-Cawapres, Caleg, dan Kepala Daerah

written by Editor2 - | 30 Oktober 2024



Kabar6-Menghadapi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak dalam waktu dekat ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan memorandum kepada jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Dalam memorandum tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepada seluruh jajaran Kejaksaan, khususnya jajaran Intelijen dan Tindak Pidana Khusus di seluruh tanah air agar dalam hal penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati.

Selain itu, perlunya mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat "*Black Campaign*", yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan.

"Guna menindaklanjuti hal tersebut saya minta agar bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan, sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu," tegas Burhannudin

Lanjut Burhannudin kepada jajarannya, "Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama."

Kemudian, khusus bagi jajaran Intelijen, guna mengoptimalkan peran intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, Jaksa Agung menyampaikan agar segera melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.

Menurut Burhanuddin, perlu segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Segera melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Perlu segera

melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama,” seru Burhanuddin.

Sementara itu, bagi jajaran Tindak Pidana Umum, guna mengoptimalkan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, Jaksa Agung menyampaikan agar:

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan umum, baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun pasca diselenggarakannya pemilihan umum.
2. Segera menyusun petunjuk teknis terkait penanganan tindak pidana pemilihan umum yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya disparitas dalam penanganan perkara dimaksud.
3. Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama.

Selanjutnya, Jaksa Agung mengingatkan Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), harus aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah.

“Hal ini perlu penanganan secara khusus dengan tetap mengedepankan kecermatan dan kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat *black campaign* yang dapat menghalangi suksesnya pemilu, serta untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, dapat dipergunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” imbuh Jaksa Agung.

\*\*Baca Juga: [Benyamin Pesan Warga Lapor Polisi soal Peredaran Narkoba di Tangsel](#)

Selain itu, Kejaksaan memiliki peran strategis untuk ikut mensukseskan gelaran pemilu yang akan dilaksanakan dalam hitungan bulan. Maka dari itu, Jaksa Agung berharap agar



pejabat terkait (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen) dapat mengolah dan menelaah masalah-masalah berdasarkan keahlian, guna memitigasi permasalahan, sebelum muncul ke permukaan.

Jaksa Agung juga mengingatkan dalam perhelatan pemilu, Kejaksaan memiliki sikap yang tegas untuk berlaku netral, hal ini selaras dengan poin ketujuh Perintah Harian Jaksa Agung tahun 2023 untuk senantiasa menjaga netralitas personel dalam menyongsong pemilu serentak 2024.

“Kejaksaan harus senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum,” ujar Jaksa Agung.

Menjelang Pemilu 2024, Jaksa Agung menyampaikan bahwa banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat. Hoaks dan fitnah terus disebarkan untuk menciptakan kebencian dan ketakutan. Hal-hal seperti ini kerap kali terjadi dalam negara demokrasi, namun jika terus dibiarkan dan tidak dilakukan mitigasi maka hal ini akan membesar menjadi konflik horizontal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.(Red)

---

## **Polda Banten Periksa Norma Atas Laporan Perselingkuhan Mantan Suaminya**

written by Editor2 - | 30 Oktober 2024



Kabar6-Polda Banten telah memeriksa Norma Risma atas laporan dugaan perzinahan yang dibuatnya. Laporan itu memuat nama ibu kandungnya, Rihana, serta mantan suaminya, Rozy Zay Hakiki. Laporan dugaan perselingkuhan mantan suami dengan ibu kandung Norma itu sudah naik ke penyidikan pada 21 Juli 2023.

“Pemeriksaan Mbak Norma masih sebagai pelapor, karena tahapannya naik dari proses penyelidikan ke penyidikan,” ujar Subadria Nuka, tim Hotman Paris 911, di Mapolda Banten, Selasa (08/08/2023).

Norma dan kuasa hukumnya dari tim Hotman Paris 911 berharap Polda Banten bisa mempercepat penanganan laporan dugaan perzinahan dan menetapkan tersangkanya. Ditreskrimum Polda Banten telah menyita handphone Norma Risma sebagai batang bukti, untuk dilakukan pemeriksaan.

“Untuk saat ini penyidik akan menyita alat bukti, yaitu handphone Norma. Terus juga ada beberapa chat yang harus dikumpulkan,” jelasnya.

\*\*Baca Juga: [Sikap Polda Banten Atas Laporan Norma Risma ke Ibu kandungnya](#)

Norma Risma sempat bertemu dengan Hotman Paris dan mengeluhkan lambatnya penanganan Polda Banten atas laporannya. Keluh kesah itu terjadi di Jakarta, pada 05 Agustus 2023 lalu.

Saat di Polda Banten, Norma menjawab 30 pertanyaan yang dilontarkan penyidik. Pemeriksaan sendiri berjalan sekitar dua jam lamanya. Sedangkan pemeriksaan Rihana baru dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi dari ibu kandung Norma Risma tersebut.

“Semua saksi-saksi termasuk orang tua Norma, Nursalam sudah dipanggil, dua terlapor juga sudah dipanggil. Selanjutnya penyidik akan memanggil terlapor saudara R. masih menunggu informasi dari saudara R, karena sudah dipanggil namun belum ada konfirmasi untuk kehadirannya,” terangnya.(Dhi)

---

# **Norma Keluhkan Lambatnya Penanganan Laporannya di Polda Banten**

written by Editor2 - | 30 Oktober 2024



Kabar6-Norma Risma berkeluh-kesah mengenai lambatnya penanganan laporan polisi di Polda Banten, atas dugaan perselingkuhan mantan suaminya, Rozy Zay Hakiki dengan ibunya, Rihana.

Permintaan agar Polda Banten segera menangani kasusnya, direkam melalui sebuah video dan diunggah ke akun resmi Hotman Paris Hutapea.

Dalam video tersebut, Norma tak sendiri, namun ditemani oleh Hotman Paris dan tim Hotman911. Hotman meminta Polda Banten segera menyelesaikan laporan polisi yang dilakukan Norma Risma, atas dugaan perselingkuhan mantan suaminya dengan sang ibu kandung.

Permintaan itu diunggah di akun Instagramnya dalam bentuk rekaman video. Dia meyakini kalau Irjen Pol Rudy Heriyanto mampu menyelesaikannya dengan baik.

“Bapak Kapolda Banten, Norma Risma datang ke Hotman911 atas dugaan intern di lingkungan keluarga, laporan polisinya agak macet, ditangani Dirkrimum Polda Banten. Bapak Kapolda Banten, Bapak Propam Polda Banten, Bapak Dirkrimum, disini datang wargamu, Ibu Norma yang mengadukan dugaan perselingkuhan di

lingkungan keluarga. Mohon agar laporan polisinya yang tersendat-sendat segera diproses, ya," ujar Hotman Paris, dikutip dari akun Instagramnya, pada Selasa (01/08/2023).

Norma ingin kasusnya segera selesai dalam waktu yang cepat, lantaran sudah mangkrak sekitar enam bulan lamanya. Kasus tersebut ditangani oleh Dirkrimum Polda Banten.

\*\*Baca Juga: [Sikap Polda Banten Atas Laporan Norma Risma ke Ibu kandungnya](#)

Dimana, mantan suaminya, Rozy Zay Hakiki, dianggap berselingkuh dengan mertuanya, Rihana, hingga digrebek warga di kosannya.

"Saya berharap semoga kasus ini bisa terselesaikan, karena menurut saya sudah terlalu lama. Saksi-saksi juga sudah jelas, saya juga mau membuka lembaran yang baru," ujar Norma Risma, dalam video yang sama, dikutip Selasa (01/08/2023).

Norma mengaku sudah lelah atas kasus dugaan perselingkuhan antara Rozy dengan ibu kandungnya, sehingga dia ingin kasusnya segera selesai secara hukum agar bisa bisa beraktifitas normal kembali. Dia sangat berharap, Polda Banten bisa segera menyelesaikan laporannya tersebut.

"Lumayan capek juga ya kalau ini enggak selesai-selesai, kalau semua enggak jelas, saya juga pengen bekerja. Bapak (Kapolda Banten) agar bisa segera menyelesaikan kasus ini," jelasnya. (Dhi)

---

# Kejari Kabupaten Tangerang

# Terima Laporan Dugaan Pungli PPDB SMAN

written by Editor2 - | 30 Oktober 2024



Kabar6-Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah menerima laporan mengenai dugaan pungutan liar yang terjadi saat Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Laporan tersebut mencatat adanya dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum panitia kepada orang tua siswa.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Ferry Herlius, melalui Kasi Intelijen Ate Quesyini Ilyas, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Langkah ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan dan bukti (pulbaket) terkait dugaan pungutan

liar tersebut.

“Ada, laporan dari warga. Itu SMAN 32 Kabupaten Tangerang yang dilaporkan. Besaran dugaan pungli dari laporan itu antara Rp2,5 juta hingga Rp5 juta per orang tua siswa,” ungkap Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Ate Quesyini Ilyas, Senin (17/7/2023).

\*\*Baca Juga: [Belum Punya Gagasan Kongkrit, Partai Gelora: Ini Lima Harapan dari Warganet untuk Bacapres](#)

Dia menambahkan bahwa laporan dari warga berawal dari kecurigaan terhadap data yang mencurigakan mengenai 10 siswa yang diterima di SMAN 32. Dari data tersebut terungkap bahwa 10 siswa yang diterima memiliki jarak yang sangat dekat dengan sekolah, yakni berkisar di antara 37 meter, 35 meter, hingga 65 meter saja.

“Ketika warga melakukan pengukuran dari sekolah sesuai dengan jarak yang tertera pada pengumuman, ternyata ditemukan bahwa salah satu siswa yang disebutkan berjarak 35 meter dari sekolah sebenarnya adalah lokasi kandang ayam, bukan rumah. Dari laporan tersebut muncul dugaan bahwa oknum panitia telah melakukan pungutan liar melalui proses verifikasi data secara online,” terangnya.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menyelidiki secara mendalam kasus ini guna menemukan kebenaran dan memastikan adanya keadilan dalam proses PPDB SMAN. Semua pihak yang kait akan dimintai keterangan untuk membantu pengungkapan kebenaran atas laporan dugaan pungutan liar ini. (Red)